



**IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY AND  
TRANSPARENCY IN FINANCIAL MANAGEMENT OF  
MIFTAHUL JANNAH MOSQUE IN BLITAR DISTRICT BASED  
ON ISAK 35**

**Kirani Salsabila<sup>1</sup>, Ruly Priantilianingtiasari<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung

[salsabilakirani343@gmail.com](mailto:salsabilakirani343@gmail.com)<sup>1</sup>, [rulypriantilia@uinsatu.ac.id](mailto:rulypriantilia@uinsatu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The mosque is a non-profit organization whose accounting records have been regulated by the Interpretation of Financial Accounting Standards No. 35. The problem that has been occurring in society is a lack of knowledge regarding the importance of accountability and transparency in financial management and mosque financial records that have not complied with applicable accounting standards. The purpose of this research is to determine the accountability and transparency implemented in financial management at the Great Miftahul Jannah Mosque, Blitar Regency, to analyze whether the financial reports at the Great Miftahul Jannah Mosque, Blitar Regency are in accordance with ISAK 35, and what the impact of not implementing ISAK 35 . The approach in this research is qualitative with a case study type. The results of this study indicate that accountability and transparency in the financial management of the Miftahul Jannah Grand Mosque as a whole have been implemented and are running well. The Miftahul Jannah Grand Mosque has not presented financial reports in accordance with ISAK 35, only presents financial reports in the form of cash in and cash out only in the General Cash Book and Financial Accountability Report.*

**Keywords:** *accountability; financial management; ISAK 35; transparency*

## PENDAHULUAN

Masjid merupakan salah satu organisasi nonlaba yang sumber dayanya berasal dari masyarakat. Masjid harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan keuangannya. Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi dibutuhkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Keuangan masjid meliputi sumber pendanaan, cara mengumpulkan dana, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana masjid.<sup>1</sup>

Masjid Agung Miftahul Jannah merupakan masjid yang berada di daerah Wlingi, Kabupaten Blitar. Melalui hasil observasi pada tahap pra penelitian masjid ini

termasuk unggul dalam jamaahnya dan mempunyai aset, baik aset fisik maupun aset keuangan yang cukup besar untuk ukuran organisasi keagamaan. Dana perolehan keuangan masjid berasal dari infaq perorangan, infaq ketika jumat, infaq akad nikah, dan lain sebagainya. Lokasi Masjid Agung Miftahul Jannah menjadi satu dengan ma'had dan MAN 2 Blitar, sehingga dana masjid juga diperoleh dari income atas pemberdayaan ekonomi di halaman masjid.

Penerapan ilmu ekonomi khususnya pada bidang ilmu akuntansi bukan hanya berkembang pada organisasi berorientasi laba melainkan juga berkembang dalam organisasi nonlaba. Diperlukan pengelolaan dana masjid yang memuat prinsip-prinsip dan asas *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya pada asas akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelolanya. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, pemerintah juga semakin menyadari perlunya

---

<sup>1</sup> Norita Citra Yuliarti, 'Akuntansi Masjid Sebagai Solusi Transparansi Dan Akuntabilitas Publik', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4.1 (2019), 13 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2106>>.

penerapan GCG pada sektor publik atau organisasi nonlaba.<sup>2</sup>

Akuntabilitas keuangan organisasi masjid bersandar pada kekuatan sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan keuangan organisasi yang harus dikembangkan secara spesifik sesuai karakteristik khusus organisasi masjid. Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap penyusunan dan transparansi atas laporan keuangan yang dimiliki oleh masjid. Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan suatu organisasi.<sup>3</sup>

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan. Organisasi dituntut menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, dan akurat. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan didukung sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan yang dilakukan. Dengan kata lain, transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi yang dimiliki.<sup>4</sup>

Laporan keuangan yang terstruktur seperti diatur dalam ISAK 35 dapat dijadikan pedoman untuk membuat laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan transparan. Secara tidak langsung, dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai melalui

---

<sup>2</sup> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Di Indonesia* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), i.

<sup>3</sup> Abrar Fauzi Maulana and Ridwan Ridwan, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.2 (2020), 270-77  
<<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>>.

---

<sup>4</sup> Muhammad Shidqon Prabowo, 'Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Islam', *Qistie*, 11.2 (2019), 257-70  
<<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>>.

penyajian laporan keuangan yang baik yaitu sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Realitanya sampai saat ini penerapan pedoman laporan keuangan organisasi nonlaba termasuk masjid belum terealisasi dengan baik, yang artinya masih terkendala dalam penerapannya sesuai standar yang berlaku yaitu ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Penelitian lainnya menyebutkan bahwa dengan adanya pelaksanaan akuntansi masjid akan membantu peningkatan akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat memenuhi kepercayaan jamaah atau stakeholders lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi

pengelolaan keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar dan untuk menganalisis laporan keuangan di Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar, apakah sudah sesuai dengan ISAK 35.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### *Good Corporate Governance (GCG)*

GCG merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. GCG terdiri dari 5 prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan keadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Frensisca Wulandari, 'Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik', *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4.1 (2015), 1-16.

---

<sup>6</sup> Imam Suwandi, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal, 'Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)', *Jurnal Manajemen*

GCG bukan hanya diterapkan pada organisasi profit, namun juga diterapkan pada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan untuk mencari laba. Hal ini tertulis pada Buku Pedoman Umum GCG yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan GCG, pemerintah juga semakin menyadari perlu adanya penerapan GCG di Sektor Publik. Contoh organisasi sektor publik di Indonesia yaitu organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi LSM, yayasan, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan organisasi keagamaan seperti masjid, gereja, pura, vihara.<sup>7</sup>

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitass adalah kewajiban penerima tanggung jawab untuk melakukan amanahnya

dalam mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.<sup>8</sup>

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari GCG. Penerapan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan pada setiap lembaga atau organisasi. Baik

pertanggungjawaban terhadap perilaku atau pekerjaan khususnya pada pengelolaan keuangan. Karena adanya pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan akan menjadi patokan dari berbagai pihak dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian parameter tercapainya prinsip akuntabilitas dalam GCG antara lain: penyiapan laporan keuangan, komite audit dan manajemen risiko, monitoring

---

*Pelayanan Publik*, 2.1 (2019), 45 <<https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>>.

<sup>7</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Universitas Terbuka, 2019), iii.

---

<sup>8</sup> Sully Kemala Octisari, Tjahjani Murdijaningsih, and Haina Idam Suworo, 'Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 Di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3 (2021), 1249 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>>.

program kegiatan, dan evaluasi program kegiatan.<sup>9</sup>

### **Transparansi**

Transparansi merupakan keterbukaan suatu organisasi dalam menginformasikan seluruh aktivitas yang dilakukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nilai transparansi ini sangat menuntut adanya kejujuran dari setiap informasi yang disampaikan dalam sebuah organisasi tidak terkecuali organisasi keagamaan seperti masjid.<sup>10</sup>

Transparansi termasuk bagian salah satu prinsip GCG yang selalu berkaitan dengan akuntabilitas. Konsep dari GCG mengemukakan bahwa transparansi

dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan atau dalam pengungkapan informasi yang relevan mengenai suatu organisasi. Kemudian parameter tercapainya transparansi dalam GCG antara lain: rencana kerja tahunan yang disosialisasikan kepada stakeholder, penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tahunan, dan sistem akuntansi berbasis, dan penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan.<sup>11</sup>

Manfaat penting dengan adanya transparansi diantaranya:<sup>12</sup>

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan

---

<sup>9</sup> Ananto Triwibowo, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta', *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4.1 (2020), 123 <<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>>.

<sup>10</sup> Riyan Pradesyah, Deery Anzar Susanti, and Aulia Rahman, 'Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 153 <<https://doi.org/10.24853/ma.4.2.153-170>>.

---

<sup>11</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat* (Kaukaba, 2016), lxxiii.

<sup>12</sup> Nico Andrianto, *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Bayumedia Publishing, 2007), xx.

mampu mengukur kinerja pemerintah.

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatkan kohesi karena kepercayaan public terhadap pemerintah akan terbentuk.

### **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk aktivitas administratif dimana penerapannya melalui beberapa cara diantaranya perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan kemudian diakhiri menggunakan adanya pertanggung jawaban terhadap siklus keluar masuknya uang pada sebuah organisasi di saat tertentu. Pengelolaan keuangan bertujuan mengatur keuangan suatu organisasi untuk menghasilkan suatu laporan pertanggung jawaban di waktu tertentu. Adanya pedoman pengelolaan keuangan adalah untuk acuan kepada pengurus dalam

mengelola dana organisasi tersebut.<sup>13</sup>

### **Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35)**

Sejak tahun 1997 laporan keuangan entitas nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Namun sejak 11 April 2019 dilakukan pencabutan atas PSAK 45 yang tertuang pada PPSAK 13 dan diterbitkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 yang merupakan interpretasi dari PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Endang, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu', *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 1.I (2019), 105-12.

<sup>14</sup> IAI, *DE PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), v.

<sup>15</sup> IAI, *DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), xxxv.

1. Laporan Penghasilan Komprehensif
2. Laporan Perubahan Aset neto
3. Laporan Posisi Keuangan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kasus yang bermaksud untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian laporan keuangan dengan ISAK 35.

Studi kasus adalah model yang memfokuskan eksplorasi "sistem terbatas" atas suatu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalan data secara mendalam.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga peneliti mengetahui aktifitas yang

dilakukan takmir masjid dalam pengelolaan keuangan melalui observasi dan wawancara. Adapun informan dari kegiatan wawancara yaitu Ketua Takmir Masjid, Sekretaris Masjid dan Bendahara Masjid. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah**

Dari sisi akuntabilitas, takmir Masjid Agung Miftahul Jannah telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Takmir menjelaskan bahwa masjid telah melakukan penyiapan laporan keuangan yang secara cepat dan tepat. Pencatatan pertama akan dilakukan oleh staff admin dengan adanya bukti transaksi serta berita acara perhitungan kotak amal masjid untuk kemudian dilaporkan kepada bendahara dan dimasukkan kedalam Buku Kas Umum (BKU).

Selanjutnya takmir mengatakan bahwa terkait komite audit dan manajemen risiko belum ada, hanya sebatas pembentukan panitia program kerja saja. Audit hanya akan dilakukan oleh inspektorat dan BPK dalam pelaporan dana hibah masjid yang berasal dari PEMDA. Selain itu takmir juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap program kegiatan masjid. Pada struktur kepengurusan takmir masjid terdapat Pembina dan Penasehat yang berasal dari kementerian agama dan MUI. Selain para seksi yang bertugas pada kegiatan yang berlangsung, kedua unsur tersebut juga ikut andil dalam pengawasan terhadap program kegiatan Masjid Agung Miftahul Jannah.

### **Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah**

Terkait dengan penerapan transparansi pada Masjid Agung Miftahul Jannah, sudah dilakukan dengan baik. Takmir sudah

melakukan penyusunan rencana program kerja tahunan dengan diadakannya rapat periodik yang dihadiri oleh seluruh pengurus masjid untuk menyusun program kerja dari masing-masing seksi. Sedangkan untuk penyediaan informasi laporan keuangan berkala triwulan, tengahan, dan tahunan, takmir sudah mealmpirkannya pada buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk sistem akuntansi berbasis, takmir sudah melakukannya walaupun belum sesuai dengan standar akuntansi masjid. Takmir menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dulu hanya manual dan hanya sebatas Buku Kas Umum saja, untuk sekarang sudah menggunakan computer. Selanjutnya terkait teknologi informasi, takmir memberikan informasi kepada publik mengenai seluruh program kegiatan masjid dan dokumen terkait laporan keuangan berupa file dokumen yang ada dikomputer ataupun hardfile bagi pengurus,

donatur, maupun masyarakat yang ingin melihat kapan saja. Penyediaan informasi kepada publik menggunakan media sosial berupa instagam, youtube, facebook, maupun website untuk menginformasikan seluruh program kegiatan masjid. Selain itu kondisi keuangan juga tetap disampaikan setiap seminggu sekali kepada masyarakat menggunakan media LED TV.

### **Kesesuaian Laporan Keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah dengan ISAK 35**

Takmir menjelaskan bahwa laporan keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah sampai saat ini belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Laporan keuangan masih dibuat secara sederhana dengan berbentuk laporan pemasukan dan pengeluaran kas masjid yang dimasukkan kedalam BKU (Buku Kas Umum). Takmir memiliki manajemen keuangan masjid dengan bentuk yang sederhana

selain mudah disusun, menurut takmir laporan keuangan mudah dimengerti. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan manajemen keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang relevan hanya sekedar buku kas umum saja sehingga tidak sesuai dengan ISAK 35. Jika entitas tidak menerapkan ISAK 35, maka laporan keuangan akan jauh dari akuntabel dan handal. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan donator dan apabila kepercayaan donator menurun maka akan berdampak pada organisasi nirlaba dan penerima manfaat yang dilayani. Oleh karena itu peneliti memberikan usulan untuk kedepannya Masjid Agung Miftahul Jannah dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Berikut merupakan laporan keuangan yang menurut ISAK 35:

**Tabel 1. Laporan Penghasilan Komprehensif**

ENTITAS NIRLABA LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF JANUARI 2022	
<b>Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Pendapatan Infaq	Rp xxx
Investasi Jangka Panjang	Rp xxx
Investasi Jangka Pendek	Rp xxx
Lain-lain	<u>Rp xxx</u>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>Beban</b>	
Biaya Konsumsi	Rp xxx
Biaya Upah	Rp xxx
Biaya Gaji	Rp xxx
Biaya Kebersihan	Rp xxx
Biaya Perbaikan	Rp xxx
Biaya Listrik, Air, dan Telepon	Rp xxx
Biaya perlengkapan	Rp xxx
Biaya Penyusutan	Rp xxx
Biaya Lain-lain	Rp xxx
<b>Total Beban</b>	<b><u>Rp xxx</u></b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp xxx</b>
 <b>PENGHASILAN</b>	 <b><u>Rp xxx</u></b>
<b>KOMPREHENSIF LAIN</b>	
 <b>TOTAL PENGHASILAN</b>	 <b><u>Rp xxx</u></b>
<b>KOMPREHENSIF</b>	

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 2. Laporan Perubahan Aset Neto**

ENTITAS NIRLABA LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO JANUARI 2022	
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	
Saldo Awal	Rp xxx
Surplus tahun Berjalan	<u>Rp xxx</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lainnya</b>	
Saldo Awal	Rp xxx
Surplus tahun Berjalan	Rp xxx
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b><u>Rp xxx</u></b>

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan**

ENTITAS NIRLABA LAPORAN POSISI KEUANGAN JANUARI 2022	
<b>ASET</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Kas	Rp xxx
Piutang Bunga	Rp xxx
Investasi jangka pendek	Rp xxx
Aset Lancar Lainnya	<u>Rp xxx</u>
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Tanah	Rp xxx
Bangunan	Rp xxx

ENTITAS NIRLABA LAPORAN POSISI KEUANGAN JANUARI 2022	
Akumulasi Penyusutan	Rp xxx
Kendaraan	Rp xxx
Akumulasi Penyusutan	Rp xxx
Peralatan	Rp xxx
Akumulasi Penyusutan	<u>Rp xxx</u>
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>TOTAL ASET</b>	
<b>ASET NETO</b>	
Aset Neto Tanpa Pembatasan	Rp xxx
Aset Neto Dengan Pembatasan	<u>Rp xxx</u>
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>Rp xxx</b>

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 4. Laporan Arus Kas**

ENTITAS NIRLABA LAPORAN ARUS KAS JANUARI 2022	
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Penerimaan Aktivitas Operasi</b>	
Pendapatan Infaq	<u>Rp xxx</u>
<b>Total Penerimaan</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>Pengeluaran Aktivitas Operasi</b>	
Biaya Konsumsi	Rp xxx
Biaya Upah	Rp xxx
Biaya Gaji	Rp xxx

ENTITAS NIRLABA LAPORAN ARUS KAS JANUARI 2022	
Biaya Kebersihan	Rp xxx
Biaya Perbaikan	Rp xxx
Biaya Listrik, Air dan Telepon	Rp xxx
Biaya Perlengkapan	Rp xxx
Biaya Lain-lain	<u>Rp xxx</u>
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>Penambahan (Pengurangan kas dari Aktivitas Operasi)</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>Rp xxx</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>Rp xxx</b>

Sumber: Data diolah, 2023

**Tabel 5. Catatan atas Laporan Keuangan**

ENTITAS NIRLABA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN JANUARI 2022	
<b>A. PENDAHULUAN</b>	
Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu organisasi dalam mengemban amanah, maka pada setiap periode harus menyampaikan terkait kondisi keuangan masjid.	
<b>B. PENDAPATAN</b>	
Pendapatan tahun 2022 (1-31 januari) sebesar Rp xxx, terdiri dari:	

ENTITAS NIRLABA	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
JANUARI 2022	
1. Kotak Amal	Rp xxx
2. Infaq Donatur	Rp xxx
3. Pendapatan lain-lain	Rp xxx
<b>C. BELANJA</b>	
Sedangkan pada pos belanja sebesar Rp xxx, terdiri dari:	
1. Belanja rutin	Rp xxx
2. Belanja Insidental	Rp xxx
<b>D. SURPLUS/DEFISIT</b>	
Posisi kas sampai dengan 31 januari 2022 sebesar Rp xxx	
<b>E. PENUTUP</b>	
Demikian laporan ini dibuat, semoga dapat dipahami serta dijadikan bahan evaluasi dan bahan masukan bagi pengurus takmir, agar kedepannya menjadi lebih baik.	

**Sumber:** Data diolah, 2023

## KESIMPULAN

Takmir mengatakan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid telah diterapkan meski belum berjalan secara maksimal. Takmir telah melakukan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu, namun dikemukakan bahwa belum adanya komite

husus terkait audit dan manajemen risiko, takmir juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan.

Untuk memenuhi transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid, takmir telah menyusun rencana kerja tahunan serta menyediakan informasi terkait laporan keuangan triwulan, tengahan, dan tahunan. Dalam penyusunan laporan keuangan, takmir menggunakan komputer dengan sistem sederhana berupa Buku Kas Umum dan Laporan Pertanggungjawaban. Takmir juga sudah menyediakan fasilitas pemberian informasi kepada publik mengenai seluruh agenda kegiatan masjid dan laporan keuangan berupa instagam, youtube, facebook, website dan LED TV.

Menurut takmir untuk laporan keuangan tidak ada yang mengenal terkait ISAK 35 dan belum adanya sosialisasi terkait ISAK 35. Laporan keuangan Masjid Agung Miftahul Jannah belum memenuhi 5 unsur dari ISAK 35

yaitu yang terdiri dari laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan belum sesuai dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan berorientasi nirlaba. Tidak diterapkannya ISAK 35 dapat menurunkan kepercayaan donator sehingga akan berdampak pada organisasi nirlaba dan penerima manfaat yang masjid layani.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto, Nico, *Good E-Government: Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government* (Bayumedia Publishing, 2007)
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik* (Universitas Terbuka, 2019)
- Diviana, Sukma, Rangga Putra Ananto, Wiwik Andriani, Roni Putra, Armel Yentifa, Zahara, and others, 'Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi', *Akuntansi Dan Manajemen*, 15.2 (2020), 113-32 <<https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>>
- Endang, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu', *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 1.I (2019), 105-12
- IAI, *DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)
- IAI, *DE PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)
- Maulana, Abrar Fauzi, and Ridwan Ridwan, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5.2 (2020), 270-77 <<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>>
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Di Indonesia* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)
- Octisari, Sully Kemala, Tjahjani Murdijaningsih, and Haina Idam Suworo, 'Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 Di

- Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21.3 (2021), 1249 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>>
- Prabowo, Muhammad Shidqon, 'Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam', *Qistie*, 11.2 (2019), 257-70 <<https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>>
- Pradesyah, Riyan, Deery Anzar Susanti, and Aulia Rahman, 'Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4.2 (2021), 153 <<https://doi.org/10.24853/ma.4.2.153-170>>
- Mudjia, Raharjo, 'Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya', (Program Pascasarjana, UIN Malang, 2017)
- Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat* (Kaukaba, 2016)
- Suwandi, Imam, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal, 'Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2.1 (2019), 45 <<https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>>
- Triwibowo, Ananto, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta', *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4.1 (2020), 123 <<https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>>
- Wulandari, Frensisca, 'Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik', *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4.1 (2015), 1-16
- Yuliarti, Norita Citra, 'Akuntansi Masjid Sebagai Solusi Transparansi Dan Akuntabilitas Publik', *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4.1 (2019), 13 <<https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2106>>